

Abstract dan Executive Summary
LAPORAN PENELITIAN HIBAH BERSAING



KONSTRUKSI IDENTITAS DAN KOMODIFIKASI BUDAYA: KAJIAN
MODEL KEBIJAKAN DAERAH UNTUK PENGEMBANGAN DAN
PELESTARIAN BUDAYA USING
(STUDI DI KABUPATEN BANYUWANGI)

Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun

Oleh:

Muhammad Hadi Makmur, S.Sos, MAP /0007107402 (Ketua)

Akhmad Taufiq, S.S, M,Pd/0019047404 (Anggota)

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

Desember 2013

**KONSTRUKSI IDENTITAS DAN KOMODIFIKASI BUDAYA: KAJIAN
MODEL KEBIJAKAN DAERAH UNTUK PENGEMBANGAN DAN
PELESTARIAN BUDAYA USING**

Peneliti : **Muhammad Hadi Makmur¹, Akhmad Taufiq²**
Mahasiswa yang terlibat : Alrisa Ayu Candra Sari ³
Sumberdana : DIPA BOPTN
Kontak Email : makmur.unej@gmail.com

Abstrak

Kajian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk wacana, program dan strategi kebijakan kebudayaan yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten dalam mengembangkan dan melestarikan kebudayaan lokal di Banyuwangi, khususnya kebudayaan Using. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif-kualitatif dengan analisis triangulasi. Metode untuk memperoleh data dilakukan melalui pengamatan, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Temuan penelitian ini bahwa seni dan tradisi budaya Using telah menjadi perhatian dan agenda penting kebijakan pemerintahan daerah kabupaten Banyuwangi. Muncul dan berkembang tiga wacana dalam kebijakan kebudayaan di wilayah kabupaten Banyuwangi, yaitu rehabilitasi dan kontrol kebudayaan, pembentukan identitas utama/pusat kebudayaan dan ketiga wacana re-identitas dan promosi kebudayaan. Terdapat tiga bentuk strategi dan program yang telah dijalankan dalam Kebijakan kebudayaan pemerintah kabupaten banyuwangi. pertama pengembangan pendidikan, kedua, pembangunan simbol atau situs dan ketiga penyiaran, pementasan dan pagelaran karya kebudayaan lokal termasuk budaya Using

Kata-kata kunci: *Kebijakan; Pemerintah Daerah, Kebudayaan, Using*

¹ Prodi Administrasi Negara, Jurusan Adminstrasi FISIP Universitas Jember

² Jurusan Pendidikan Bahasa Dan Sastra, FKIP Universitas Jember

³ Prodi Administrasi Negara, Jurusan Adminstrasi FISIP Universitas Jember

Abstract

This research study aims to determine the forms of discourse , cultural policy programs and strategies made by the district local governments in developing and preserving local culture in Banyuwangi , especially Using culture . This research is a qualitative descriptive - analytical triangulation . Methods for obtaining the data is done through observation , interviews , documentation and library research . The findings of this research that the arts and cultural traditions Using has been a concern and an important agenda Banyuwangi regency government policy . Emerge and evolve three discourse in cultural policy in Banyuwangi district , first, the rehabilitation and control culture , second is the establishment of a major identity / cultural center and third re- identity discourse and cultural promotion . There are three forms of strategies and programs that have been implemented in the district banyuwangi cultural policy . The first, development of education , second, the development of symbols or cultural sites. and third, broadcasting, staging and performances of local culture including cultural works Using

Key words: Policy; Local Government, Culture, Using

Executive Summary

KONSTRUKSI IDENTITAS DAN KOMODIFIKASI BUDAYA: KAJIAN MODEL KEBIJAKAN DAERAH UNTUK PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BUDAYA USING

Peneliti : **Muhammad Hadi Makmur⁴, Akhmad Taufiq⁵**
Mahasiswa yang terlibat : Alrisa Ayu Candra Sari ⁶
Sumberdana : DIPA BOPTN
Kontak Email : makmur.unej@gmail.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perubahan sistem pemerintahan sentralistik menjadi sistem desentralistik sebagaimana termaktub dalam UU No.32 tahun 2004 membawa konsekuensi terjadinya perubahan terhadap pengelolaan dan pelestarian budaya bangsa. Perubahan sistem pemerintahan tersebut menempatkan peran pemerintah yang semula merupakan operator tunggal dalam pelestarian warisan budaya, selanjutnya menjadi fasilitator, dinamisator, dan koordinator dalam pelestarian budaya. Disamping itu, Otonomi daerah memberikan peluang kepada masyarakat untuk lebih berperan serta dalam upaya pelestarian budaya, dengan harapan bahwa sumber daya budaya harus dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Tetapi disisi yang lain dampak dari otonomi daerah, dengan adanya tuntutan kemandirian fiskal, mendorong pemerintah daerah cenderung berlomba-lomba bagaimana segala sesuatunya ditarik pada ranah untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD). Selain itu juga segala entitas sosial termasuk entitas budaya juga ditarik oleh para pihak dalam pusaran politik praktis kekuasaan di tingkat daerah. Sehingga kebijakan tertentu seringkali digunakan untuk kepentingan pencitraan elit politik yang sedang berkuasa dan untuk mempertahankan tingkat kepercayaan publik

⁴ Prodi Administrasi Negara, Jurusan Adminstrasi FISIP Universitas Jember

⁵ Jurusan Pendidikan Bahasa Dan Sastra, FKIP Universitas Jember

⁶ Prodi Administrasi Negara, Jurusan Adminstrasi FISIP Universitas Jember

terhadap penguasa eksekutif dan legislatif suatu wilayah. Tak jarang kebijakan daerah termasuk kebijakan terkait kebudayaan tersebut menjadi semacam ajang perlombaan bagi kekuatan kekuasaan untuk menunjukkan secara artifisial identitas mereka terhadap kepentingan kelompok atau komunitas masyarakat tertentu, termasuk komunitas budaya. Sehingga dikawatirkan kebijakan daerah terkait pengembangan dan pelestarian kebudayaan dibiarkan demi kepentingan ekonomi dan keuntungan kekuasaan politik lokal, yang justru kontra produktif dengan maksud pengembangan dan pelestarian kebudayaan itu sendiri.

Banyuwangi merupakan daerah di Jawa Timur yang paling banyak memiliki kekayaan budaya. Kekayaan budaya Banyuwangi ini terlihat dari beragamnya produk-produk budayanya, mulai dari bahasa, tradisi ritual, tari, teater dan musik tradisional. Menurut catatan dinas kebudayaan dan pariwisata Banyuwangi pada tahun 2009, tercatat ada 12 macam kebudayaan berbasis ritual, 12 macam tari tradisional, 4 macam musik tradisional dan 2 macam teater tradisional yang hidup di Banyuwangi. Salah satu ikon kebudayaan di Banyuwangi adalah kebudayaan masyarakat Using.

Banyak dan beragamnya produk seni dan tradisi budaya yang hidup di masyarakat Banyuwangi tersebut tentu bagi pemimpin pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang patut menjadi perhatian dan agenda penting dalam kebijakannya, untuk itu menjadi penting bagi penulis untuk mengetahui bagaimana wacana, program dan strategi kebijakan pemerintahan kabupaten Banyuwangi terkait dengan kebudayaan yang ada di Banyuwangi, khususnya terkait Using.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada tahap I ini adalah :

1. Mendiskripsikan bentuk-bentuk wacana kebijakan pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Using
2. Mendiskripsikan program dan strategi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi dan nilai yang menjadi landasannya dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Using

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, sehingga akan terdiskripsikan keadaan subyek atau obyek penelitian yaitu kebijakan pemerintah daerah dalam melestarikan dan mengembangkan budaya lokal berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, dengan wilayah penelitian di kabupaten Banyuwangi. Informan yang digunakan adalah; 6 (enam) informan dari dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, 2 (dua) informan dari dinas pendidikan dan 3 (tiga) informan dari tokoh budaya dan pegiat kesenian tradisi Banyuwangi. Untuk memperoleh data yang diperlukan, dilakukan pengamatan, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Untuk mendapatkan keabsahan dan kepercayaan data peneliti melakukan triangulasi data baik secara metode maupun sumber. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interaktif model milles & Huberman, teknik ini menurut Sugiono,(2008). dimulai dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan Penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat di kabupaten Banyuwangi memiliki banyak bentuk seni budaya dan adat istiadat tradisional yang berbasiskan pada etnik. Beberapa bentuk produk budaya masyarakat Banyuwangi yang merupakan kesenian asli maupun dari akulturasi budaya antar etnis (Dariharto, 2009)

Dari hasil penelitian ini peneliti memperoleh beberapa poin kesimpulan bahwa Kebudayaan lokal Banyuwangi khususnya terkait seni dan tradisi budaya Using telah menjadi perhatian dan agenda penting kebijakan sebagian besar rezim pemerintahan daerah kabupaten Banyuwangi. Perhatian pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi yang sangat menonjol adalah pada masa pemerintahan bupati Djoko Supaat Slamet (1966 – 1978), Samsul Hadi (2000 – 2005) dan Abdullah Azwar Anas,(2010 – sekarang). Selain ketiga Bupati tersebut yang cukup memberikan perhatian adalah bupati Turyono Purnomo Sidik (1991 – 2000) dan Ratna Ani Lestari(2005 – 2010).

Unsur kebudayaan menjadikan bagain penting agenda kebijakan oleh sebagian besar rezim pemerintahan daerah kabupaten Banyuwangi. Melalui bungkus

pengembangan dan pelestarian Kebudayaan, budaya dan seni tradisi masyarakat Banyuwangi dikemas tidak saja untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga menjadi arena dialektika wacana kebijakan kebudayaan.

Dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan tiga wacana kebijakan kebudayaan di wilayah kabupaten Banyuwangi. Pertama kebijakan rehabilitasi dan kontrol kebudayaan. Kedua kebijakan pembentukan identitas utama kebudayaan dan ketiga kebijakan re-identitas dan promosi kebudayaan. Wacana kebijakan pertama dikembangkan pada masa orde baru, sedangkan wacana kedua dan ketiga setelah reformasi atau pada era otonomi daerah.

Masing-masing wacana kebijakan tersebut berupaya mengkonstruksi kebudayaan Banyuwangi. Wacana kebijakan pertama, berangkat dari nilai dasar bahwa kebudayaan melekat padanya ideologi politik-partai tertentu. sehingga kebijakan kebudayaan bisa mengontrol dan diarahkan pada ideologi partai rezim, setidaknya budaya dan seni tradisi masyarakat bisa dinetralisir dari unsur-unsur ideology politik-partai tertentu. Pada wacana kedua dan ketiga berangkat pada representasi atau siapa (etnik, agama) yang mewakili identitas kebudayaan, sekaligus untuk apa kebudayaan itu.

Tabel. Perkembangan Wacana Kebijakan Kebudayaan Di Banyuwangi

	Wacana Kebijakan Kebudayaan		
	Rehabilitasi label dan kontrol kebudayaan daerah	Pembentukan identitas pusat kebudayaan daerah	Re-identitas pusat dan promosi kebudayaan daerah
Tokoh utama pemerintah	Djoko Supaat, Purnomo Sidiq	Samsul Hadi	Azwar Anas,Ratna
Actor pendukung	Lembaga Penyiaran, Individu budayawan	Kelompok budayawan (DKB)	individu Budayawan, Swasta
Basis nilai	<ul style="list-style-type: none"> • Menetralisir kebudayaan Banyuwangi dari stigma negative dan label PKI pada kesenian tradisional Banyuwangi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebudayaan dan Kesenian using (gandrung) sebagai identitas utama Banyuwangi • “Banyuwangi adalah Using” 	<ul style="list-style-type: none"> • Memposisikan Using sebagai bagian dari kebudayaan dan kesenian Banyuwangi • “Banyuwangi adalah Using, jawa,Madura Islam, ,dll(multikultur) • Kebudayaan ditarik dari basis sejarah

	<ul style="list-style-type: none"> • Banyuwangi dan keseniannya bebas dari label PKI • Kebudayaan ditarik dari basis ideologi politik 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebudayaan ditarik dari basis akar komunitas etnik tertentu (using) 	banyuwangi (Blambangan)
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Menumbuhkan kreatifitas kesenian (using) dalam batas ideologi politik tertentu (orde baru) 	<ul style="list-style-type: none"> • Menumbuhkan kreatifitas dan menjadikan kebudayaan Using (etnik) sebagai kebanggaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menumbuhkan kemajuan (ekonomi-kesejahteraan) Banyuwangi berbasis kreatifitas kebudayaan (multikultur)

Sumber: Hasil Analisis

Seperti yang disampaikan oleh Gaventa (1980), bahwa kebijakan bekerja melalui proses manipulasi citra sosial, Simbol dan bahasa. Kebijakan pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi dalam membangun wacana kebudayaannya, menggunakan kekuatan-kekuatan seperti bahasa, simbol-simbol atau lambang fisik yang kemas dalam bentuk program masing masing.

Dari program-program yang dilaksanakan pemerintah kabupaten Banyuwangi ditemukan tiga strategi utama kebijakan yaitu, melalui pendidikan, pembungunan simbol-simbol fisik dan pementasan pagelaran masal. Strategi kebijakan melalui pendidikan dan pelatihan memiliki tujuan agar budaya dapat dikenal oleh generasi dan masyarakat juga dapat memiliki ketrampilan atas kesenian-kesenian tradisional Banyuwangi. strategi ini dilakukan oleh pemerintah daerah menjadikan bahasa local seperti Using sebagai Muatan lokal kurikulum bahasa di sekolah-sekolah SD-SMA. Pembuatan, penerbitan dan penyebaran kamus bahasa Using dan majalah berbahasa Using “Seblang”, penerbitan pakem pementasan gandrung serta pendirian akademi gandrung yang ditujukan melahirkan para penari gandrung profesional, pematenan hak kebudayaan Using; Tari Gandrung, Janger, Seblang, Patrol, Hadrah Kuntulan, Kebo-keboan, Jaranan Butho, Angklung Carok, Macopatan Lontar Yusuf, dan Patrol. menjadikan gandrung (tari berpasangan) sebagai maskot wisata dan tari resmi penyambutan tamu (Jejer Gandrung)

Strategi pembangunan simbol budaya, memiliki tujuan untuk membangun identitas daerah, dilakukan dalam bentuk pembangunan patung kesenian dan penentuan desa budaya (Using). Strategi pementasan dan pagelaran budaya memiliki tujuan untuk membangun fantasi, citra dan promosi kebudayaan selanjutnya bisa berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi-kunjungan wisata-ke daerah. Strategi ini dilakukan melalui program kegiatan seperti perekaman dan penyiaran lagu-lagu daerah (Using), Pekan dan festival Budaya, Pekan berbusana Using, dan menjadikan desa Kemiren sebagai Desa Wisata Adat Using. Strategi kebijakan ini menyitir pendapatnya Effendy dan Anoeagrajekti (2004) juga bisa berfungsi menjadi alat mobilisasi kepentingan politik, dimana kebudayaan yang berkembang dalam komunitas digunakan ataupun dilaksanakan bukan hanya didasarkan pada nilai esensi yang terkandung didalamnya melainkan efektifitasnya dalam menghimpun massa

Tabel: Strategi Kebijakan Kebudayaan Pemerintah

Bentuk strategi	Tujuan
Pendidikan dan pelatihan	Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kebudayaan(bahasa dan kesenian Using)
Pembangunan lambang/symbol/situs	Pembentukan identitas kota
Penyiaran, Pementasan/pagelaran	Citra, Promosi, Sosialisasi kebudayaan dan peningkatan ekonomi (wisata) daerah.

Sumber: hasil Analisis

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini peneliti memperoleh kesimpulan bahwa kebudayaan lokal Banyuwangi khususnya terkait seni dan tradisi budaya Using telah menjadi perhatian dan agenda penting kebijakan sebagian besar rezim pemerintahan daerah kabupaten Banyuwangi. Berkembang tiga wacana dalam kebijakan kebudayaan di wilayah kabupaten Banyuwangi. Pertama wacana kebijakan rehabilitasi dan kontrol kebudayaan. Kedua wacana kebijakan pembentukan identitas utama/pusat kebudayaan dan ketiga wacana kebijakan re-identitas dan promosi kebudayaan. Wacana kebijakan pertama dikembangkan pada masa orde baru, sedangkan wacana kedua dan ketiga setelah reformasi atau pada era otonomi daerah. Masing-masing wacana kebijakan tersebut berupaya mengkonstruksi seni dan tradisi budaya lokal, termasuk budaya Using. Terdapat tiga bentuk strategi dan program yang dijalankan dalam Kebijakan kebudayaan pemerintah kabupaten banyuwangi. pertama dalam

bentuk pengembangan pendidikan, kedua pembangunan simbol atau situs dan yang ketiga penyiaran, pementasan dan pagelaran karya kebudayaan lokal termasuk budaya Using. Strategi pertama bertujuan Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kebudayaan(bahasa dan kesenian Using), strategi kedua bertujuan untuk pembentukan dan penguatan identitas kota, dan strategi ketiga untuk membangun citra, promosi, sosialisasi kebudayaan dan peningkatan ekonomi (wisata) daerah banyuwangi

KATA KUNCI

Kebijakan; Pemerintah Daerah, Kebudayaan, Using

REFERENSI

- Effendy, Bisri dan Anoegrajekti, Novi, 2004, Perempuan Dalam Ritual, Mengangan Dewi Sri Membayang Perempuan, Jurnal Srinthil, edisi 07 (November 2004): <http://srinthil.org/374/perempuan-dalam-ritual-mengangan-dewi-sri-membayang-perempuan/> (diakses 5 oktober 2013)
- Gaventa, John, 1980, *Power And Powerlessness; Quiescence And Rebellion In Appalachian Valley*, Clarendon Press, Oxford.hlm.12
- Dariharto, 2009, Kesenian Gandrung Banyuwangi, Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi,.hlm.2-4
- Sugiyono.2008 Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D, Bandung, CV Alfabeta, hlm. 218